

DAFTAR REFERENSI

- Amirusna, R., Purnomo, A. M., & Setiawan, K. (2025). Pengaruh Efektivitas Komunikasi Interpersonal Aparatur terhadap Kualitas Pelayanan Prima di Kecamatan Bojong Gede. *Karimah Tauhid*, 4(12), 9399–9408. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i12.22070>
- Arianto, K. K. P. M., Wismayanti, K. W. D., & Winaya, I. K. (2024). Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar. *IJESPG Journal*, 2(1), 119–131.
- B., E., & Febrianda, J. (2026). Pemenuhan Hak Atas Makanan Bagi Warga Binaan Sebagai Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 2128–2140. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5639>
- Bulla, D., Pala, A., & Agustian, D. (2023). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II KEFAMENANU. *JianE: Jurnal Administrasi Negara*, 5(3), 127–138.
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 425–438.
- Dewi, A. P. M., Putri, H. A. A., & Dewi, N. (2025). Analisis Yuridis Dampak Over Kapasitas pada Ruang Tahanan terhadap Hak-Hak Narapidana. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 343–352. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4050>
- Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020). Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 431. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.431-444>
- Fathimah, H. N., & Hartini, S. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. *AGORA: Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 12(1), 61–72.
- Firmansyah, H., Putra, S. D., Siahaan, S. A., Michelle, G. B., Gunawan, A. V., & Cendranita, I. (2024). SOSIALISASI TATA CARA PENYELENGGARAAN SIDANG PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENGADILAN NEGERI. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1035–1040. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.32072>
- Irfayanti, E. L., Hadi, H. M. C., & Mahayana, I. M. B. (2022). Gambaran Tingkat Kepadatan Hunian Kamar Dan Insiden Penyakit Yang Diderita Warga Di Banjar Lingkungan Badak Sari Tahun 2022. *JURNAL SKALA HUSADA: THE JOURNAL OF HEALTH*, 19(2), 58–64.
- Kusmadi, R., Basoddin, & Muhram, L. O. (2023). PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDARI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN BERTUJUAN PEMULIHAN BAGI WARGA BINAAN. *Sultra Law Review*, 5(1), 2716–2730.

- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Nelwitis, Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 136–148.
- Paramita, N. P. I., & Prabawati, N. P. A. (2025). Efektivitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Dalam Menunjang Birokrasi Kejaksanaan yang Bersih Melayani (Studi Kasus Kejaksanaan Tinggi Bali). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3), 1–8.
- Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “PASTI” Kemenkumham. *Jurnal HAM*, 10(1), 39. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.39-55>
- Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>
- Pramastuti, H., & Armono, Y. W. (2024). Fungsi Rumah Tahanan Negara dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta). *Juris Delict Journal*, 1(1), 37–50.
- Puspitasari, C. A. (2018). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELANGGARAN HAK NARAPIDANA DAN TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHANAN NEGARA. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 33–46.
- Putriningtyas, A., & Ritohardoyo, S. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Perumahan Pada Kondisi Lingkungan Di Solo Baru*. 1–8.
- Rahim, A. N., Ibrizah, Z., Purwanti, S., & Dwivayani, K. D. (2026). Pola Komunikasi Interpersonal antara Petugas Lapas dan Warga Binaan pada Proses Assessment dalam Pembinaan di Lapas Narkotika Samarinda. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(3), 387–394. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2476>
- Rahman, H. (2025). Hak atas Kesehatan sebagai Hak yang Tidak Dapat dibatasi oleh Negara beserta Implikasinya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 15(2), 11–20.
- Rahmat, D., NU, B., & Daniswara. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *WIDYA PRANATA HUKUM*, 3(2), 134–150.
- Sanusi, A. (2016). ASPEK LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Aspects Of Health Cares Towards Convicts And Inmates). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 37–56.

- Savira, W. D., & Subadi, W. (2023). KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DILIHAT DARI ASPEK TANGIBLE (BERWUJUD) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS HIKUN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG . *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 749–762.
- Simatupang, T. H. (2009). PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (ANALISIS HUKUM: PENINGKATAN KUALITAS SISTEM KUNJUNGAN DI LAPAS). *Lex Jurnalica*, 7(1), 35–49.
- Siregar, R. A. (2025). Manfaat Pembinaan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Proses Pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN*, 71–83.
- Situmorang, D. M. (2017). Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 249–263. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.249-263>
- Sultonudin, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 1–39.
- Suranta, E., Agustina, C., Angeline, G. V., Sinaga, I. A., & Oematan, V. D. B. V. R. (2026). OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Gavenengen Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 2(1), 31–38.
- Syaukat, M. (2026). REHABILITASI DAN REINTEGRASI NARAPIDANA: STUDI TENTANG EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3(2), 820–826.
- Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 381–394. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.381-394>
- Zebua, I. K., Daulay, H., & Madya, F. (2024). PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 131. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8463>